

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu dan korporasi kepada pemerintah, dan kewajiban ini didukung oleh landasan hukum yang kokoh, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain membiayai infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pajak sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Diprediksi bahwa undang-undang pajak saat ini cukup untuk memenuhi atau bahkan melampaui target pendapatan pajak tahunan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, penagihan pajak seringkali menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, interpretasi aturan yang berbeda-beda, dan kelemahan dalam sistem administrasi pajak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan dalam proses pemungutan pajak dan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Penting untuk mendiskusikan isu ini guna mengembangkan langkah terbaik, baik melalui perubahan kebijakan, peningkatan teknologi informasi pajak, maupun upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, pendapatan pajak diperkirakan akan mencapai target serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan. [1].

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas penggunaan barang dan jasa di dalam negeri. Ketika menyediakan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP), wajib pajak (PKP) wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dapat dikenakan pada setiap tahap dalam rantai produksi dan distribusi. PPN yang dibayarkan pada tahap sebelumnya dapat dikreditkan kembali pada tahap berikutnya, sehingga proses pemungutan pajak dilakukan secara bertahap, memastikan bahwa hanya nilai yang diciptakan yang sebenarnya dikenakan pajak. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak

Penjualan atas Barang Mewah diatur secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang telah mengalami beberapa perubahan dan amandemen, termasuk yang terbaru, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap pendapatan negara di sektor perpajakan dan memiliki peran krusial dalam sistem perpajakan Indonesia. Selain itu, PPN berfungsi sebagai alat untuk mengontrol operasi manufaktur dan distribusi, mengatur kebiasaan konsumsi, mendorong transparansi dalam transaksi komersial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang sistem PPN, landasan hukumnya, dan dampaknya secara ekonomi sangat penting bagi pemerintah sebagai regulator, wajib pajak, dan petugas pajak sebagai pihak yang terikat oleh aturan perpajakan. [2].

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga mencapai 12% berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika perekonomian nasional. Salah satu dampak langsung yang dapat diamati adalah menurunnya aktivitas komersial pada sektor-sektor konsumsi, seperti toko ritel, supermarket, restoran, pusat perbelanjaan, serta berbagai bisnis jasa dan perdagangan lainnya. Peningkatan tarif ini secara otomatis menaikkan harga barang dan jasa, karena beban PPN pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Dengan demikian, masyarakat harus mengeluarkan biaya 12% lebih tinggi dibandingkan harga sebelum kenaikan pajak, yang pada gilirannya dapat mendorong konsumen untuk mengurangi atau bahkan membatalkan transaksi pembelian.

Dampak ini paling terasa pada kalangan menengah dan menengah bawah yang memiliki keterbatasan daya beli, di mana setiap kenaikan harga berimplikasi langsung terhadap pola konsumsi rumah tangga. Aliran dana terbesar dalam perekonomian memang berasal dari kelompok menengah dan atas, namun kelompok menengah bawah justru lebih rentan terdampak karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketika PPN meningkat, kecenderungan masyarakat untuk mengurangi konsumsi menjadi semakin besar, sehingga volume penjualan produk pun menurun. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada daya beli konsumen, tetapi juga berdampak terhadap

keberlangsungan usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang sangat bergantung pada tingginya permintaan konsumen.

Selain itu, kenaikan PPN dapat memicu efek domino berupa meningkatnya inflasi. Hal ini terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa akibat pajak akan memengaruhi biaya hidup secara keseluruhan, termasuk harga kebutuhan pokok. Apabila inflasi meningkat secara signifikan, maka daya beli masyarakat semakin tergerus, dan distribusi pendapatan pun berpotensi menjadi semakin tidak merata. Proporsi pendapatan yang dapat disisihkan untuk tabungan atau investasi kemungkinan besar menurun, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kata lain, meskipun tujuan kenaikan PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini memiliki konsekuensi ekonomi yang kompleks dan perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap kestabilan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. [3].

Salah satu teknik machine learning yang paling sering digunakan dalam masalah klasifikasi adalah Support Vector Machine (SVM). Ide dasar di balik SVM adalah menciptakan fungsi hiperplane yang dapat membagi data ke dalam kelas-kelas yang berbeda dengan cara terbaik. Fungsi hiperplane bertindak sebagai batas keputusan antara kelas-kelas yang berbeda dalam ruang berdimensi tinggi. Kelas data ditentukan oleh SVM berdasarkan lokasinya relatif terhadap hiperplane saat data baru dimasukkan, memungkinkan klasifikasi yang sangat akurat. Keuntungan utama SVM adalah kemampuannya menangani data berdimensi tinggi, seperti teks, gambar, dan data numerik yang kompleks. SVM dikenal sangat efektif dalam klasifikasi teks karena dapat menangani sejumlah besar fitur, seperti kata-kata dalam dokumen, sambil tetap mempertahankan kinerja yang baik. Selain itu, SVM memanfaatkan konsep margin maksimum, yaitu jarak terbesar antara data pelatihan terdekat dengan hiperplane, yang dikenal sebagai vektor pendukung. SVM dapat menciptakan model yang lebih umum dan kurang rentan terhadap overfitting dengan memaksimalkan margin ini. Akibatnya, SVM telah menjadi salah satu algoritma paling populer dalam penelitian dan aplikasi praktis, terutama di bidang

pengenalan pola, analisis sentimen, dan Pemrosesan Bahasa Alami (NLP), yang menangani data dengan volume dan kompleksitas yang besar. [4].

Penelitian ini menggunakan teknik Support Vector Machine (SVM) sebagai metode analisis untuk mengolah data yang diperoleh dari situs media sosial X. Fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji sikap dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang secara resmi akan diberlakukan mulai Januari 2025. Kenaikan tarif ini telah menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menyuarkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap daya beli konsumen, inflasi, dan stabilitas perekonomian rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, sebagian yang lain memberikan dukungan, dengan pandangan bahwa kebijakan tersebut dapat memperkuat penerimaan negara serta memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.

Dalam era digital saat ini, media sosial seperti X telah menjadi salah satu kanal komunikasi publik yang paling berpengaruh, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengekspresikan opini mereka secara terbuka dan real-time. Namun, volume data yang sangat besar, sifatnya yang tidak terstruktur, serta keragaman ekspresi opini menjadikan analisis manual hampir tidak mungkin dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis berbasis *machine learning* yang mampu mengolah data secara sistematis, cepat, dan akurat. SVM dipilih karena algoritma ini terbukti efektif dalam menangani data berukuran besar, memiliki kemampuan generalisasi yang baik, serta menghasilkan performa klasifikasi yang tinggi dalam konteks analisis sentimen.

Nilai strategis penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap opini publik secara lebih terukur dan obyektif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembuat kebijakan. Hasil analisis dapat membantu pemerintah memahami bagaimana kebijakan kenaikan PPN diterima oleh masyarakat, sekaligus mengidentifikasi potensi penyebaran misinformasi atau hoaks yang dapat menimbulkan resistensi sosial. Selain itu, temuan penelitian ini

juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan persuasif dalam menjelaskan urgensi serta manfaat dari kebijakan fiskal tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan SVM, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis dalam pengembangan ilmu data dan analisis sentimen, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, teridentifikasi masalah sebagai dasar dilaksanakannya penelitian ini diantaranya:

1. Keluhan masyarakat di platform media sosial X mengenai kenaikan PPN 12% mengindikasikan kecemasan tentang semakin tinggi harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli, terutama untuk masyarakat menengah. Walaupun kebijakan ini ditujukan untuk barang-barang mewah, dampaknya juga berimbas pada kebutuhan pokok, sehingga membebani pengeluaran keluarga, mengurangi kemampuan konsumsi, dan menurunkan kualitas hidup.
2. Data yang diperoleh dari platform media sosial seperti X dapat sangat beragam dalam hal kualitas dan konteks. Beberapa komentar mungkin mengandung bahasa yang kurang teratur, seperti pemakaian emotikon, kalimat yang tidak utuh, atau bahasa sehari-hari yang sukar untuk diproses secara otomatis.
3. Sejauh mana sentimen masyarakat pada platform social media X dapat diklasifikasikan secara akurat ke dalam kategori positif atau negatif menggunakan analisis sentimen berbasis SVM

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah tersebut:

1. Bagaimana proses menggunakan SVM untuk menganalisis sentimen opini masyarakat pada social media X mengenai kebijakan peningkatan PPN dan mengkategorikannya ke dalam sentimen positif, negatif?

2. Bagaimana proses mengolah data yang beragam dan tidak terstruktur, seperti emotikon, kalimat tidak utuh, atau bahasa sehari-hari, dalam analisis sentimen di platform media sosial X?

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Data yang digunakan hanya berasal dari media sosial X (Twitter) dengan kata kunci tertentu yang berkaitan dengan “kenaikan PPN 12%” yang berjumlah 5000 data tweets.
2. Periode pengambilan data dibatasi pada bulan November 2024 – Januari 2025.
3. Analisis sentimen yang dilakukan hanya mengklasifikasikan opini masyarakat ke dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif, tanpa mempertimbangkan sentimen netral.
4. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya Support Vector Machine (SVM).
5. Proses pelabelan sentimen dilakukan menggunakan lexicon-based approach, sehingga hasil klasifikasi sangat bergantung pada kualitas kamus yang digunakan.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian yang dapat ditetapkan adalah:

1. untuk menerapkan metode SVM dalam menganalisis sentimen opini masyarakat pada social media X mengenai kebijakan kenaikan PPN, serta mengkategorikan sentimen tersebut ke dalam kategori positif atau negatif
2. untuk mengembangkan metode yang efisien dalam menangani data yang beragam dan tidak teratur, seperti emotikon, kalimat yang tidak lengkap, atau bahasa sehari-hari, dalam analisis sentimen dari platform media sosial seperti X.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, ada beberapa Manfaat Penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Membantu memahami sentimen opini masyarakat mengenai kebijakan kenaikan PPN di social media X, yang dapat mendukung pengambilan keputusan pemerintah.
2. Menyediakan metode yang dapat mengolah data tidak terstruktur di media sosial, seperti emotikon dan bahasa sehari-hari, untuk analisis yang lebih akurat.

1.7 Waktu Pelaksanaan Skripsi

Pada Oktober 2024, proses penulisan tesis dimulai dan akan berlanjut hingga semua penelitian selesai. Penulisan tesis terdiri dari beberapa tahap, seperti menyusun proposal, menyelenggarakan seminar proposal, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis hasil penelitian, dan menyusun laporan akhir. Sesuai dengan kalender akademik program, setiap tahap dilaksanakan secara sistematis. Diperkirakan penelitian ini akan dilanjutkan secara sistematis dengan jadwal pelaksanaan yang jelas, menghasilkan temuan yang dapat diterapkan dan bermanfaat baik dalam konteks akademik maupun praktis.

1.8 Metodologi Skripsi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan analisis sentimen berbasis pembelajaran mesin (machine learning) dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari media sosial X (Twitter). Data yang dikumpulkan berupa tweet yang membahas mengenai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.

Secara garis besar, tahapan penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan isu kenaikan PPN 12%, data dikumpulkan melalui proses crawling di media sosial X.

2. Pengolahan Data

Data mentah diolah melalui tahap case folding, tokenizing, penghapusan kata stop, dan stemming untuk mempersiapkannya untuk analisis.

3. Penandaan Data

Menggunakan kamus leksikon sentimen, setiap tweet diklasifikasikan sebagai memiliki sentimen positif atau negatif.

4. Pembuatan Model

Pendekatan Support Vector Machine (SVM) digunakan untuk membuat model klasifikasi yang dilatih menggunakan data pelatihan

5. Pengujian Model

Menggunakan data pengujian, model dievaluasi menggunakan metode evaluasi berbasis matriks kebingungan.

6. Evaluasi Hasil

Untuk menentukan kemampuan model dalam mengklasifikasikan sentimen, metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score digunakan untuk evaluasi.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sikap publik terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dan menghasilkan model klasifikasi praktis untuk menganalisis sentimen media sosial.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam enam bab dengan uraian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi skripsi, waktu pelaksanaan, serta sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, antara lain konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN), media sosial X, analisis sentimen, serta metode *machine learning* khususnya Support Vector Machine (SVM). Selain itu, bab ini juga memuat uraian penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai bahan perbandingan.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, tahapan pra-pemrosesan data, metode pelabelan, serta teknik analisis menggunakan algoritma SVM dan evaluasi kinerja model.

4. BAB IV Analisis dan Perancangan

Bab ini menguraikan analisis kebutuhan sistem, perancangan alur kerja penelitian, serta pembuatan model perancangan menggunakan diagram UML seperti use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram, yang menjadi acuan dalam pembangunan sistem analisis sentimen.

5. BAB V Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil implementasi analisis sentimen menggunakan metode SVM, hasil pengujian model, performa yang diperoleh melalui confusion matrix (akurasi, presisi, recall, F1-score), serta pembahasan mengenai interpretasi temuan penelitian.

6. BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

